



ANALISIS PAGU INDIKATIF BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis:

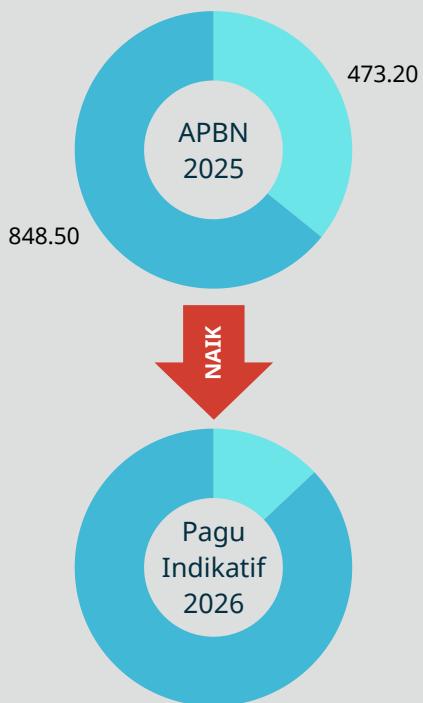
Robby A. Sirait, M.E., Ade Nurul Aida, M.E., Leo Iskandar, S.E.

JUNI 2025

Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2025	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
BSSN Dalam RPJMN 2025-2029	05
Gambaran Keamanan Siber	06





Pagu Indikatif 2026

Pagu Indikatif Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2026 sebesar Rp.2.963,9 miliar, dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp 384,3miliar dan Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara Rp2.579,6 miliar.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut meningkat sebesar 101,2 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp1.321,6 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.

Overview Anggaran 2020-2025

HALAMAN 3



Alokasi program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara pada 2025 meningkat hampir 150% dari tahun 2024

Pada periode 2020-2023, realisasi anggaran menunjukkan peningkatan signifikan dari capaian yang sangat rendah di tahun 2020 (46,3%) menuju kinerja yang sangat baik pada 2022 (98,2%) dan 2023 (96%), mencerminkan perbaikan efektivitas pelaksanaan program. Sementara pada 2024 dan 2025 terjadi tren peningkatan alokasi anggaran.

Setelah peningkatan signifikan pada 2021, terutama pada program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara, anggaran kedua program menurun tajam pada 2022. Namun, tren meningkat kembali dari 2023 hingga 2025, dengan alokasi program keamanan siber pada 2025 mencapai Rp848,5 miliar (hampir 150 persen kenaikan dari tahun 2024).



Proporsi program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara mengalami peningkatan hingga 64%.

Sejak tahun 2023, proporsi program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara mengalami peningkatan. Di tahun 2025 proporsi program tersebut mencapai 64%, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan digital nasional dan kapasitas kelembagaan BSSN.



Porsi Belanja Barang Merupakan Jenis Belanja Terbesar Pada 2020-2025 mencapai hampir 45%

Berdasarkan jenis belanjanya selama periode 2020-2025 secara rata-rata didominasi oleh belanja barang yakni sebesar 44,45%, kemudian diikuti oleh belanja pegawai (29,45%) dan belanja modal (26,08%)

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4



Target Keluaran/Output 2025

- Perluasan Cakupan Area National Cyber Security Operation Center, 1 Tbps Titik
- Sistem Pemantauan dan Deteksi Ancaman Siber Sosial, 3 Paket
- Infrastruktur Kriptografi Nasional (Cryptography as a Service), 1 Unit
- Sarana Operasi Analisis Sinyal, 1 Paket
- *National Cyber Exercise Drill Test*, Orang
- Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D, 300 Orang
- Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D, 650 Lulusan
- Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah Pusat, Lembaga
- Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang Teregistrasi, Lembaga
- Kerjasama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber, 1 Kerjasama
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Keamanan SPBE Lingkup Instansi Pengelola Aplikasi Umum dan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional, 24 Lembaga
- Operasi Audit Keamanan SPBE, 13 Operasi
- Operasi Penanganan Perkara Cyber Related Crime, 1 Operasi
- Peningkatan Budaya Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber, 4 Operasi



Target Outcome

- Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Siber Nasional

BSSN Dalam RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 2 (PN 02) Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
PROGRAM PRIORITAS (PP)	02.05. Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal		
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Terwujudnya interaksi dan transaksi siber, persandian, dan sinyal yang aman		
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Indeks Kemanan dan Ketahanan Siber		
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	02.05.01 Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi	02.05.02 Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana keamanan siber, sandi, dan sinyal nasional	01. Terpenuhinya SDM keamanan siber dan sandi nasional	
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi	01. Rata-rata Competency Gap Index (CGI) SDM siber dan sandi	

BSSN bertanggungjawab melaksanakan PP 02.05 guna menopang pencapaian PN 02 pada target indikator sasaran Global Cybersecurity Index sebesar 98 pada 2029.

TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS

- Indeks Kemanan dan Ketahanan Siber ditargetkan ditahun 2029 sebesar 0,84

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran Indeks Kemananan dan Ketahanan Siber sebesar 0,84 pada 2029, BSSN bertanggungjawab menjalankan 2 KP, yakni KP 02.05.01 dan KP 02.05.02

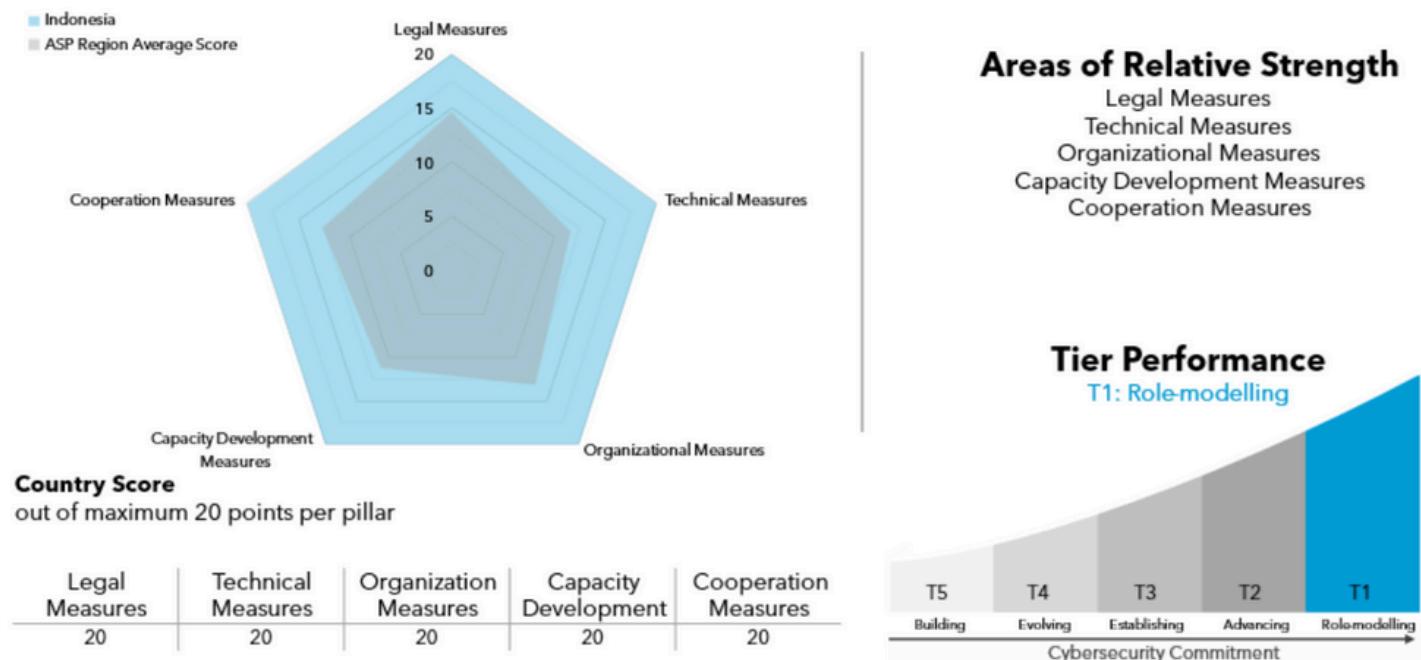
TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi ditahun 2029 ditargetkan sebesar 66,7%.

Rata-rata Competency Gap Index (CGI) SDM siber dan sandi di targetkan di 2029 sebesar 8%.

Untuk mencapai target Indeks Kemanan dan Ketahanan Siber, terdapat beberapa proyek prioritas, yakni: (a) Pembangunan sarana dan prasarana keamanan siber, sandi, dan sinyal; dan (b) Sertifikasi produk keamanan siber, sandi, dan sinyal; (c) Pelatihan dan peningkatan profesionalisme SDM keamanan siber, sandi, dan sinyal; (d) Peningkatan budaya keamanan siber, sandi, dan sinyal.

Gambaran Keamanan Siber



*Countries are classified according to www.itu.int.

Sumber: International Telecommunication Union, 2024

**INDONESIA
MASUK
DALAM
KATEGORI
TIER 1**

Dalam Laporan Global Cybersecurity Index (GCI) 2024 yang dirilis oleh International Telecommunication Union (ITU). Indonesia berhasil masuk ke dalam Tier 1, kategori tertinggi dalam pengelompokan negara-negara berdasarkan komitmen mereka terhadap keamanan siber. Laporan ini mengevaluasi upaya keamanan siber negara-negara di lima kategori utama, yaitu aspek hukum, teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama. Dengan pendekatan analisis lima tingkat yang baru, laporan ini lebih fokus pada progres dan dampak nyata dari kebijakan keamanan siber di masing-masing negara. Dengan kondisi tersebut Indonesia kini berada di peringkat 64 dari 193 negara pada tahun 2024, meningkat 24 peringkat dari posisi 88 pada tahun 2020.

**TANTANGAN
MASIH DI
HADAPI
DALAM ERA
DIGITAL**

Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, Indonesia tidak boleh lengah dalam menghadapi tantangan di era digital, seperti perkembangan teknologi, lonjakan trafik data yang tidak wajar, serta meningkatnya ancaman siber. Perkembangan teknologi di Indonesia membawa dampak positif dalam berbagai sektor, namun juga meningkatkan risiko ancaman siber yang lebih kompleks. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mengalami lonjakan trafik data anomali yang signifikan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih 330.527.636 anomali trafik, dengan puncaknya terjadi pada Desember 2024 sebanyak 112.085.045 insiden. Anomali ini meliputi aktivitas mencurigakan seperti penyebaran malware dan upaya akses ilegal yang berpotensi menjadi serangan siber. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang mengganggu layanan 210 instansi pemerintah (CNN Indonesia, 2025), menandai salah satu insiden keamanan siber terburuk di Indonesia.

**HAL YANG
PERLU JADI
PERHATIAN**

Guna memperkuat keamanan digital nasional, diperlukan peningkatan kualitas SDM, regulasi yang lebih kuat, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta peningkatan literasi keamanan siber.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)